EDISI JUMAT 29 AGUSTUS 2025

HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan

02 GOVERMENTTODAY
Anggaran Subsidi Listrik 2026 Naik, Tembus Rp 101,72 Triliun

04 NUSANTARA
Masalah Tak Berujung Program MBG
427 Anak Keracunan di Bengkulu hingga Nampan Terindikasi Minyak Babi

10 LISTSTYLE
Jelajahi Dubrovnik, Kota Indah di Kroasia Selatan

WAMEN RANGKAP JABATAN, NO WAY

POLEMIK WAMEN RANGKAP JABATAN:

SEBELUM 2025

Isu Wamen rangkap jabatan pernah muncul, namun belum ada larangan tegas.

AWAL 2025

Polemik kembali mencuat setelah diketahui sejumlah Wamen merangkap jabatan sebagai komisaris/direksi di BUMN maupun swasta.

PERTENGAHAN 2025

Advokat Viktor Santoso Tandiasa mengajukan uji materi Pasal 23 UU No. 39/2008 ke MK agar larangan rangkap jabatan juga berlaku untuk Wamen.

28 AGUSTUS 2025

MK putuskan larangan rangkap jabatan bagi Menteri & Wamen (Putusan 128/PUU-XXIII/2025), beri grace period untuk penyesuaian.

PASCA PUTUSAN

Istana apresiasi, namun belum sikapi ±30 Wamen rangkap jabatan.

Banyaknya wakil menteri (wamen) yang merangkap jabatan sempat menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Sebenarnya, Wamen rangkap jabatan ini bukan isu baru, tapi sempat memanas lagi beberapa waktu lalu. Isu ini mencuat saat beberapa wakil menteri diketahui menduduki posisi lain di luar tugas kementerian, seperti menjadi komisaris atau direksi di BUMN maupun berusahaan swasta. Perdebatan ini berpusat pada etika, efektivitas, dan legalitas rangkap jabatan tersebut, yang pada akhirnya memicu permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hasilnya, MK memutuskan larangan wakil menteri merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris atau direksi pada perusahaan negara maupun swasta, atau pimpinan organisasi yang dibiayai APBN maupun APBD. Penegasan itu tertuang pada putusan MK untuk Perkara Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang disampaikan dalam sidang putusan di Ruang Sidang Pleno MK di Jakarta, Kamis (28/8/2025) sore. Dalam putusannya, MK menegaskan bahwa wakil menteri memiliki status yang setara dengan menteri sebagai pejabat negara. Oleh karena itu, larangan rangkap jabatan yang berlaku untuk menteri juga seharusnya berlaku untuk wakil menteri. MK berpendapat bahwa rangkap jabatan dapat mengganggu independensi, profesionalitas, dan konsentrasi wakil menteri. Putusan ini secara efektif melarang wakil menteri untuk merangkap jabatan sebagai komisaris atau direksi di BUMN, BUMD, maupun perusahaan swasta. Keputusan MK tersebut langsung mendapat respon dari istana yang meng-apresiasi dan siap menindak-lanjutinya. Namun, pemerintah belum memberikan pernyataan lebih lanjut terkait para Wamen yang rangkap jabatan. Setidak-nya ada 30 Wamen yang me-nempati posisi komisaris dan COO di perusahaan milik negara.

BACA HAL 11...

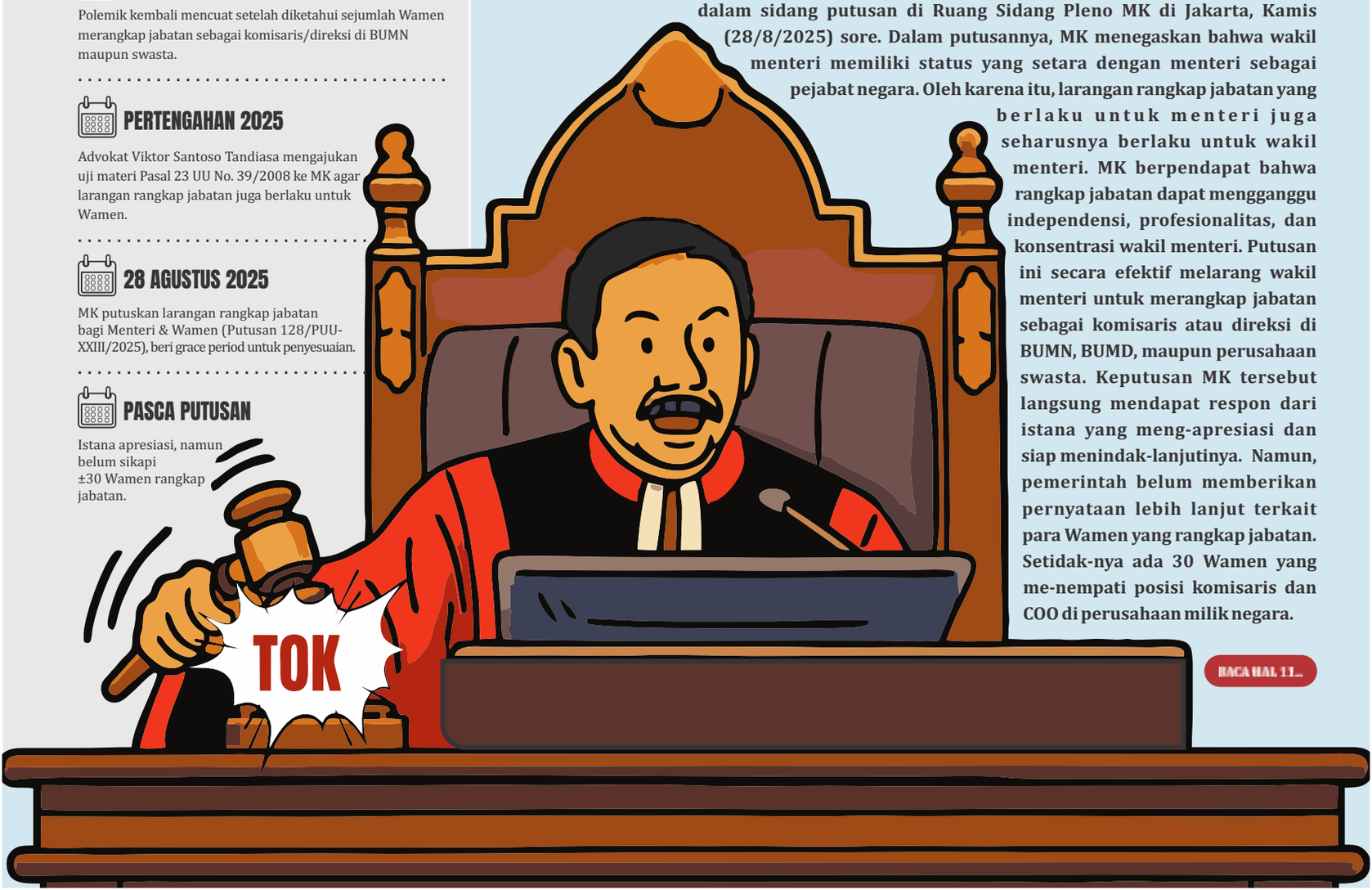

ANGGARAN SUBSIDI LISTRIK 2026 NAIK, TEMBUS RP 101,72 TRILIUN

Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan subsidi listrik pada tahun 2026 telah ditetapkan sebesar Rp 101,72 triliun. Jumlah tersebut mengalami kenaikan Rp 14 triliun dibandingkan alokasi 2025 yang dipatok sebesar Rp 87,72 triliun. Penambahan itu hasil kesepakatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Komisi XII DPR RI terkait Asumsi Dasar Sektor ESDM Rencana Anggaran dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026.

Ilustrasi pelanggan prabayar PLN tengah mengisi token listrik.

Bahlil menjelaskan melonjaknya subsidi listrik pada tahun depan dilatar-belakangi oleh meningkatnya jumlah pelanggan listrik yang menerima subsidi. "Terkait dengan klarifikasi kenapa peningkatan subsidi naik menjadi Rp 101 triliun. Itu jumlah pelanggan yang naik, tapi kami akan lampirkan pelanggannya dari berapa ke berapa. Sehingga inherent alasan kenapa kemudian subsidi itu bisa naik," ujar Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, dikutip antara Kamis (28/8/2025).

Terkait dengan penambahan anggaran subsidi tersebut, Bahlil menegaskan bahwa pihaknya bersama PLN akan memastikan penggunaan anggaran subsidi tersebut tepat sasaran. "Ini juga sekaligus menjadi tugas kami dalam melakukan pengawasan terhadap implementasi penggunaan anggaran subsidi untuk PLN. Nanti kami akan lampirkan," katanya.

Selain subsidi listrik, Komisi XII dan Kementerian ESDM juga menyepakati besaran volume LPG 3 kg yang dipatok sebesar 8,31 juta metrik ton. Kemudian, menyepakati volume subsidi BBM sebesar 19,162 juta KL, terdiri dari minyak tanah sebesar 0,526 juta KL, minyak solar sebesar 18,636 juta KL.

Lalu, subsidi tetap minyak solar ditetapkan sebesar Rp 1.000 per liter, cost recovery sebesar US$ 8,5 miliar. Selanjutnya, besaran Indonesian Crude Price (ICP) ditetapkan sebesar US$ 70 per barel.

Sedangkan lifting minyak dan gas bumi (migas) sebesar 1.594 ribu Bare Barrels of Oil Equivalent per Day (BOEPD), terdiri dari minyak sebesar 610 ribu Barrel of Oil Per Day (BOPD) dan gas bumi sebesar 984 BOEPD.

Sementara itu, Anggota Komisi XII DPR RI, Mukhtarudin mengapresiasi alokasi anggaran energi dalam RAPBN 2026 tersebut. Diantaranya subsidi listrik Rp 101,7 triliun, BBM subsidi 19,16 juta kiloliter, dan LPG 3 kg 8 juta MT sebagai investasi sosial yang mendukung daya beli sekaligus menjaga ruang fiskal. Dia juga menandaskan bahwa arah kebijakan energi nasional semakin menekankan efisiensi dan pemerataan.

Mukhtarudin menilai alokasi anggaran Rp 21,67 triliun untuk Kementerian ESDM pada 2026 memperlihatkan komitmen pemerintah dalam memperbaiki tata kelola subsidi energi dan memperkuat pembangunan infrastruktur strategis.

"RAPBN 2026 sektor ESDM adalah momentum penting untuk menata ulang kebijakan energi. Saya melihat pemerintah serius melakukan reformasi, khususnya dalam mekanisme subsidi energi yang lebih akurat, sekaligus membangun infrastruktur yang bisa menjangkau masyarakat luas," ujar Mukhtarudin dalam keterangan tertulis, Kamis (28/8/2025).

Mukhtarudin secara khusus mengapresiasi upaya Kementerian ESDM dalam mentransformasi subsidi LPG 3 kg menjadi lebih tepat sasaran berbasis data penerima manfaat (DTSEN). Menurut dia, dengan basis data penerima manfaat menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam pembelian, subsidi menjadi lebih tepat sasaran, mengurangi potensi penyalahgunaan, meningkatkan keadilan energi bagi masyarakat kecil, nelayan, dan petani.

Sementara itu, alokasi Rp 15,78 triliun belanja publik fisik diarahkan pada proyek-proyek strategis. Proyek tersebut antara lain tambahan jaringan gas rumah tangga (jargas) Rp 4,8 triliun, pipa gas Cisem-Dusem Rp 2,36 triliun, program listrik desa (Lisdes) Rp 5 triliun (dari total Rp 61,65 triliun hingga 2029), pembangunan PLTS Rp 460 miliar, PLTMH Rp 53,9 miliar, dan PA-TS Rp 40 miliar.

"Infrastruktur ini adalah instrumen pemerataan energi. Jargas memperluas akses energi bersih, pipa gas memperkuat ketahanan energi industri, dan PLTS serta PLTMH memberi opsi energi terbarukan. Semua ini adalah investasi jangka panjang untuk energi nasional," tambahnya.

Mukhtarudin juga menekankan pentingnya program Lisdes sebagai wujud nyata pemerataan pembangunan. Dengan anggaran yang disiapkan, ia berharap program listrik desa mampu mengaliri 5.700 desa dan 4.400 dusun yang belum teraliri listrik, terutama di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). (rls,ant/lut)

ANGGARAN SUBSIDI LISTRIK SEJAK 2020:

Terkait dengan klarifikasi kenapa peningkatan subsidi naik menjadi Rp 101 triliun. Itu jumlah pelanggan yang naik, tapi kami akan lampirkan pelanggannya dari berapa ke berapa. Sehingga inherent alasan kenapa kemudian subsidi itu bisa naik,"

BAHLIL LAHADALIA,
Menteri ESDM RI

TRANSISI PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
JANGAN GANGGU LAYANAN JEMAAH

Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq, meminta agar proses transisi penyelenggaraan Haji dan Umroh dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umrah tidak mengganggu layanan jemaah. Ia mengatakan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah akan berjalan pasca pengesahan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung DPR, Selasa (26/8/2025).

Pelaksanaan haji jemaah asal Indonesia. (Antara)

"Kementerian Haji dan Umrah adalah tonggak baru penyelenggaraan ibadah haji yang diharapkan semakin baik. Negara hadir untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji dan umrah. Karena itu, transisi kelembagaan ini jangan sampai mengganggu layanan jemaah," ujar Kiai Maman, sapaan akrabnya, di Jakarta, Kamis (28/8/2025).

Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan bahwa proses transisi mencakup pengalihan tugas dan fungsi, pegawai, pendanaan, perlengkapan, hingga dokumen dari Kementerian Agama dan Badan Pengelola Haji (BP Haji) ke Kementerian Haji dan Umrah. Untuk itu, ia menekankan pentingnya koordinasi intensif antar lembaga agar pengalihan berjalan lancar dan tidak menimbulkan hambatan.

Indonesia selama ini dikenal sebagai negara dengan jumlah jemaah haji dan umrah terbesar. Kiai Maman menekankan, pelayanan terhadap jemaah harus tetap menjadi prioritas, baik pada musim haji maupun keberangkatan umrah yang berlangsung hampir setiap hari.

"Transisi ini jangan sampai mengganggu kenyamanan jemaah, terutama dalam pengelolaan sistem informasi dan data umrah. Hambatan sekecil apa pun bisa menimbulkan keresahan. Maka harus dipastikan semua berjalan baik," tegasnya.

Selain itu, Kiai Maman mendorong Kementerian Haji dan Umrah segera melakukan sosialisasi luas kepada para pemangku kepentingan, termasuk biro perjalanan dan masyarakat. Sosialisasi ini penting agar jemaah merasa tenang dan yakin tidak akan terdampak oleh proses transisi.

"Jangan sampai ada jemaah yang tertunda keberangkatannya hanya karena masalah administratif. Kami minta koordinasi dan sosialisasi dilakukan secara intensif agar tidak ada kendala," pungkasnya.

Sementara itu, Pakar Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof Dyah Mutiarin mengatakan Kementerian Haji dan Umrah hasil transformasi Badan Penyelenggara (BP) Haji harus segera mewujudkan perbaikan layanan bagi jemaah.

"Kita berharap ada perbaikan dalam pelayanan kepada jemaah yang selama ini masih menyisakan sejumlah persoalan," kata dia di Yogyakarta, Kamis (28/8/2025) dilansir antara.

Ia mengatakan pembentukan kementerian baru membutuhkan alokasi anggaran besar, mulai dari struktur menteri, wakil menteri, hingga perangkat birokrasi pendukung. Kondisi tersebut berpotensi kontradiktif dengan semangat efisiensi yang selama ini digaungkan pemerintah.

"Proliferasi organisasi biasanya sulit sejalan dengan upaya efisiensi. Justru efisiensi dicapai dengan perampingan struktur, bukan penambahan," ujarnya.

Mutiarin juga menilai keputusan politik lebih menonjol ketimbang pertimbangan teknokratis dalam pembentukan kementerian tersebut. "Kalau kita lihat, jumlah kementerian di era Presiden Prabowo sudah cukup besar, bahkan melebihi pemerintahan sebelumnya. Apalagi ada penambahan kementerian di tengah jalan. Tentu ada pertimbangan politik di balik keputusan tersebut," katanya.

Kementerian Haji dan Umrah adalah tonggak baru penyelenggaraan ibadah haji yang diharapkan semakin baik. Negara hadir untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji dan umrah. Karena itu, transisi kelembagaan ini jangan sampai mengganggu layanan jemaah,"

MAMAN IMANUL HAQ
Anggota Komisi VIII DPR RI

Oleh karena itu, dia berharap, Kementerian Haji dan Umrah harus mampu menjawab persoalan klasik yang masih membayangi penyelenggaraan haji, mulai dari praktik penipuan, lemahnya pengawasan, hingga peningkatan kualitas layanan transportasi, katering, dan kesehatan.

"Karena sudah dibentuk, kementerian ini harus bisa memberikan jawaban atas berbagai persoalan haji dan umrah, bukan justru menambah masalah baru," ujar dia.

Terpisah, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas memaparkan sejumlah kesepakatan yang dicapai dalam pembahasan RUU Haji antara pemerintah dengan DPR. Pertama, penguatan kelembagaan dari BP Haji menjadi kementerian yang menyelenggarakan sub-urusan pemerintahan haji dan umrah sebagai penyelenggara dan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Kedua, mewujudkan ekosistem haji dan umrah melalui pembentukan satuan kerja dan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, serta kerja sama dengan pihak terkait. Ketiga, pengaturan kuota haji untuk petugas haji yang terpisah dari kuota haji Indonesia.

Berikutnya, penambahan kuota haji tambahan; pengaturan pemanfaatan sisa kuota; pengaturan pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji khusus yang mendapatkan visa haji nonkuota. Lalu, pengaturan tanggung jawab pembinaan ibadah haji dan kesehatan terhadap jemaah haji, mekanisme peralihan pascaperubahan Badan Penyelenggara Ibadah Haji menjadi kementerian.

Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) menyebut pembentukan Kementerian Haji ini jadi tonggak sejarah baru Indonesia. Ketua Umum DPP AMPHURI Firman M Nur berpendapat kementerian baru ini akan lebih fokus melayani jemaah serta melindungi ekosistem usaha Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang resmi.

Ia juga menekankan pentingnya posisi strategis Kementerian Haji dan Umrah dalam diplomasi internasional terutama dengan Kerajaan Arab Saudi.

Sementara, Pengamat kebijakan haji dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ade Marfuddin berpendapat pembentukan Kementerian Haji ini memiliki semangat dalam memperbaiki tata kelola pelaksanaan haji bagi jemaah asal RI. "Saya kira ada nuansa positif, harapan untuk perbaikan haji semakin nampak ke depan," kata Ade Marfuddin dikutip cnnindonesia, Rabu (27/8/2025). (rls,ant,ist/lut)

HARIAN LENTERA
Inspirasi Perubahan

MASALAH TAK BERUJUNG PROGRAM MBG

427 Anak Keracunan di Bengkulu hingga Nampan Terindikasi Minyak Babi

Sudah 7 bulan lebih sejak digeber pada Januari, permasalahan demi permasalahan terus mewarnai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kasus keracunan seakan tak berujung, bergantian di berbagai daerah Indonesia. Tak hanya kualitas makanannya, kini nampan (food tray) juga diragukan karena terindikasi mengandung minyak babi.

Jumlah siswa yang diduga keracunan setelah menyantap hidangan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, terus bertambah. Data sementara hingga Kamis, (28/8/2005), tercatat sebanyak 427 siswa yang menderita gejala mual, muntah, dan lemas setelah menyantap makanan MBG di sekolahnya.

Korban diduga keracunan makanan MBG itu berasal dari berbagai sekolah, mulai pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga sekolah dasar (SD) di Lebong. Antara lain, siswa dari SD IT Al Azhar, PAUD IT Al Azhar, SD Muhammadiyah 1 A Ujung Tanjung, dan TK IT Tabeak Kauk. Para siswa dari sekolah itu mengalami gejala mual, muntah dan lemas seusai mengkonsumsi hidangan MBG yang terdiri atas mi, bakso, sayuran, susu, dan telur, pada Rabu, 27 Agustus 2025.

Selanjutnya, sebagian besar korban dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Lebong sejak Rabu pagi. Jumlah korban makanan MBG yang dirawat di RSUD Lebong terus bertambah hingga hari ini.

Wakil Gubernur Bengkulu Mian sudah menjenguk para korban di RSUD Lebong. Mian memastikan pemerintah provinsi akan menambah pasokan obat untuk penanganan darurat terhadap para korban.

“Saya sudah minta dinas kesehatan provinsi menambah buffer stock obat ke Lebong. Walaupun stok cukup untuk 100 pasien ke depan, kami tetap tambah agar siap menghadapi kondisi darurat,” kata Mian, dikutip dari Antara, pada Kamis, 28 Agustus 2025.

Ia mengatakan saat ini Pemprov Bengkulu bergerak cepat untuk memastikan perawatan berjalan optimal. “Atas nama Pak Gubernur, kami pastikan semua ditangani sebaik mungkin. Pemerintah harus hadir,” kata dia.

Wakil Bupati Lebong Bambang Agus Suprabudi mengatakan kendala utama yang dihadapi sejak awal penanganan korban adalah keterbatasan fasilitas tempat tidur pasien. “Kemarin (Rabu) kendala kami adalah tempat tidur. Tetapi kondisi itu sudah diatasi. BPBD telah mengirimkan tambahan kasur untuk pasien,” kata Bambang.

Pemerintah daerah berharap kondisi ratusan siswa yang menjadi korban keracunan massal makanan MBG itu dapat segera pulih setelah ada tambahan obat-obatan dari provinsi dan dukungan fasilitas kesehatan dari kabupaten.

Ratusan pelajar dilarikan ke RSUD Lebong setelah menyantap MBG. Ist

Respons BGN

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan keprihatinan atas kasus dugaan keracunan makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Lebong, Bengkulu, yang hingga kini dilaporkan sudah menimpa 427 anak. “Memprihatinkan,” kata Dadan melalui pesan tertulis pada Kamis (28/8/2025).

Dadan mengatakan satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG) yang baru mulai beroperasi sejak 7 Agustus 2025. Namun, setelah ada kejadian keracunan massal di Lebong, Bengkulu, dia menginstruksikan agar operasional SPPG dihentikan sementara.

“Untuk perbaikan prosedur pelayanan sambil membangun kembali kepercayaan,” ujar Dadan. “Saya akan minta kepada 4.000 SPPG baru agar menerapkan SOP secara ketat agar kepercayaan publik tetap terjaga."

Kapolda Bengkulu Irjen Pol Mardiyono yang meninjau langsung para korban di Kabupaten Lebong menegaskan saat ini pihaknya memprioritaskan penanganan medis. "Saat ini kami utamakan dulu untuk penanganan pasien-pasien anak-anak," ujar Mardiyono.

Ia menambahkan, pihaknya akan melakukan investigasi mulai dari dapur hingga jalur penyaluran makanan MBG. "Untuk sementara kita tidak bisa menyimpulkan karena hasil dari laboratorium BPOM sendiri belum keluar, dari Polres juga sudah meminta keterangan namun hasilnya belum bisa kita dapatkan," kata Mardiyono.(wid,ant,ist/dya)

MUI Minta Kepastian Kehalalan Food Tray

Menu MBG di Kabupaten Lebong, Bengkulu, beredar di media sosial, Rabu (27/8/2025). (Dok, facebook)

MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) menanggapi serius isu dugaan penggunaan minyak babi (lard) dalam proses produksi nampan makanan atau food tray program Makan Bergizi Gratis (MBG). MUI mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memberikan jaminan penuh atas aspek kehalalan dalam implementasi program prioritas pemerintah tersebut.

Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh, menilai MBG merupakan program strategis yang harus didukung. Namun, ia mengingatkan agar pelaksanaannya tidak mengabaikan prinsip syariat.

"Program MBG ini sangat strategis dan bagus. MUI menilai program ini penting dan harus didukung. Karenanya dalam implementasinya harus dijalankan secara proper, termasuk jaminan kehalalan," kata Niam di Jakarta, Kamis (28/8/2025).

Niam menekankan perlunya kerja sama erat antara BGN dan otoritas terkait untuk mencegah ke-teledoran. Menurutnya, dugaan penggunaan minyak babi dalam food tray perlu ditelusuri dan dimitigasi secara serius.

"Pengelola, dalam hal ini BGN dan otoritas terkait, harus bahu membahu. Jangan sampai teledor. Informasi dugaan adanya pemanfaatan minyak babi dalam food tray perlu ditelusuri," tegasnya.

Isu ini mencuat setelah laporan Indonesia Business Post (IBP) mengungkap dugaan produksi food tray MBG di wilayah Chaoshan, Guangdong, China. IBP melaporkan ada 30–40 pabrik yang memproduksi ompreng untuk pasar global, termasuk yang diduga dipakai dalam program MBG di Indonesia.

Laporan itu juga menyebut adanya dugaan pemalsuan label "Made in Indonesia" dan logo SNI pada nampan makanan. Lebih jauh, IBP menyinggung bahwa nampan tipe 201 berpotensi mengandung kadar mangan tinggi yang tidak aman untuk makanan asam, serta indikasi penggunaan minyak babi dalam proses produksi.

Badan Pengawas Obat dan Makanan akan melakukan uji sampel food tray. Kepala BPOM Taruna Ikrar menyatakan bahwa rencana itu akan dilakukan sesegera mungkin.

“Badan POM akan menindaklanjuti isu ini dalam bentuk akan mengetes,” ujarnya. Ia menjelaskan ada dua metode yang bisa dipakai BPOM untuk menguji benarkah ada kandungan minyak babi dalam ompreng makan bergizi itu. (wid,rla,ant/dya)

RICUHNYA DEMO BURUH DAN MAHASISWA DITUDING DITUNGGANGI ASING: NO-STATE

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono mengungkapkan ada dalang dari pihak luar di balik aksi demonstrasi di Gedung MPR/DPR yang berujung ricuh. Meski belum menunjuk hidung pihak mana yang bertanggungjawab, tapi di tegaskannya no-state atau bukan sebuah negara.

Para pendemo melemparkan batu ke arah polisi. Di kawasan Senayan, pendemo membakar baliho papan iklan. Reuters

Pada Kamis (28/8/2025) siang, sebagian besar buruh yang turun ke jalan sejak pagi telah meninggalkan lokasi demonstrasi di Gedung DPR di Jakarta.

Namun, pada pukul 13.47 WIB, sejumlah mahasiswa terpantau melakukan aksi jalan kaki dari Palmerah menuju Gedung DPR.

Para demonstran mahasiswa berunjuk rasa menentang fasilitas dan tunjangan mewah yang diberikan anggota DPR. Situasi memanas saat aparat kepolisian berupaya memukul mundur para demonstran. Tak lama kemudian, aparat melepaskan meriam air (water canon) dari dalam Gedung DPR membuat massa aksi berhamburan menyeberang jalan tol.

Pada pukul 15.35 WIB, massa mundur dari depan Gedung DPR. Polisi kemudian membubarkan masa dengan membuat barikade dan mendorong mereka untuk menjauhi gedung DPR.

Petugas keamanan terus memukul mundur massa pengunjuk rasa dari Gedung DPR hingga ke kolong jalan layang Pejompongan, Slipi, dekat Stasiun Palmerah, sehingga massa menjadi terpecah.

Hingga pukul 17.00 WIB, kericuhan masih terjadi di sekitar Stasiun Palmerah.Sebagian dari mereka membalas tindakan aparat kepolisian dengan melempar kembang api dan batu atau benda keras. Pada pukul 20.14 WIB, tampak situasi lalu lintas berangsur normal usai massa membubarkan diri.

Sebelumnya, erusuhan yang sama terjadi saat ibuan massa menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR pada 25 Agustus 2025. Demo saat itu juga soal rencana kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR sebesar Rp 50 juta per bulan.

Menanggapi rentetan unjuk rasa yang diwarnai bentrokan tersebut, Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono mengungkapkan ada dalang dari pihak luar di balik aksi demonstrasi di Gedung MPR/DPR.Hendropriyono berjanji akan mengungkapkan sosok tersebut.

"Ini ada yang main gitu. Pada waktunya saya bisa sampaikan namanya yang main. Itu dari sana," kata Hendropriyono di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (28/8/2025).

"Dari luar. Dari luar," sambungnya.

Menurut dia, pihak luar tersebut menggerakan kaki tangannya yang ada di Indonesia. Hendropriyono meyakini pihak dalam negeri ini tak menyadari bahwa dirinya diperalat.

"Orang yang dari luar hanya menggerakkan kaki tangannya yang ada di dalam. Dan saya sangat yakin bahwa kaki tangannya di dalam ini tidak ngerti bahwa dia dipakai. Tapi pada waktunya nanti harus dibuka," jelasnya.

Hendropriyono menyebut pihak luar tersebut bukanlah sebuah negara. Meski begitu, kata dia, aktor luar tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kebijakan negaranya.

"Sebetulnya non-state. Tapi pengaruhnya sangat besar kepada kebijakan dari negaranya. Kebijakannya itu langkah-langkahnya kita baca selalu pas dengan usulan dari non-state," ujar Hendropriyono.

"Non-state tapi isinya George Soros, isinya George Tenet, isinya tadi saya sampaikan David Rockefeller, Bloomberg. Baca sendirilah kaum kapitalis begitu. Itu yang usul," sambung dia. Dia menuturkan tujuan aktor luar negeri itu tak berbeda jauh saat zaman kolonial atau penjajahan yakni, ingin menguasai Indonesia. Hanya saja, metode mereka saat ini tak menggunakan bom ataupun peluru.

"Tujuannya kan sama saja. Dari dulu juga maunya menjajah. Tapi kan caranya lain. Dulu kan pakai peluru, pakai bom. Kalau kita masih diam saja ya habis kita," pungkas Hendropriyono. (wid,ant,rls/dya)

Aparat menghalau massa di depan gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (28/8/2025).afp

Istana: Prabowo Teken Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh

MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani dasar aturan pembentukan Satuan Tugas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh.

Hal ini yang menjadi salah satu tuntutan serikat pekerja pada demo hari ini di depan DPR RI.

Prasetyo menjelaskan, pemerintah terus melakukan koordinasi dengan pimpinan dari serikat pekerja.

"Beberapa waktu lalu sudah disetujui dan ditandatangani oleh Bapak Presiden, untuk selanjutnya nanti akan kita tindak lanjuti dengan kita akan berkumpul lagi bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan," kata Prasetyo, di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (28/8/2025).

Menurutnya, pembentukan Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh akan dibicarakan dengan kalangan pengusaha baik dari Apindo maupun Kadin.

"Supaya satgas dan Dewan Kesejahteraan Buruh ini bisa segera kita bekerja sebagaimana yang kita sudah sepakat di dalam diskusi-diskusi kita," ujar dia.

Terkait dengan demo hari ini oleh kalangan serikat pekerja, menurutnya, ini merupakan bentuk dari penyampaian aspirasi. Dengan pembentukan dua lembaga itu, diharapkan aspirasi buruh bisa lebih terserap dan ditemukan solusinya.

"Teman-teman buruh menyampaikan aspirasi saya kira itu sesuatu hal yang lain ya, Itu juga tidak ada masalah sebagai sebuah penyampaian aspirasi yang nanti justru kita berharap dengan sekarang terbentuk Dewan Kesejahteraan Buruh dan Satgas PHK itu akan bisa komunikasi lebih intens," pungkasnya. (wid,ist, ant/dya)

MASSA BURUH MENGUSUNG 6 TUNTUTAN, YAITU:

1. Hapus Outsourching dan Tolak Upah Murah (HOSTUM). Naikkan Upah Minimum Tahun 2026 sebesar 8,5 sampai 10,5 persen.

2. Setop PHK: Bentuk Satgas PHK

3. Reformasi Pajak Perburuhan: Naikan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, Hapus pajak pesangon, Hapus pajak THR, Hapus pajak JHT, Hapus diskriminasi pajak perempuan menikah.

4. Sahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan tanpa Omnibuslaw.

5. Sahkan RUU Perampasan Aset: Berantas Korupsi.

6. Revisi RUU Pemilu: Redesign Sistem Pemilu 2029

HARIAN LENTERA
Inspirasi Perubahan

KASUS KEHAMILAN REMAJA DI KOTA BATU TINGGI, TEMBUS 31 ANAK PER APRIL 2025

BATU - Kasus kehamilan remaja di Kota Batu masih tinggi. Dari data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batu, per April tercatat 31 anak mengalami kehamilan, sementara 21 remaja lainnya sudah menjalani persalinan. Untuk menekan angka tersebut, Dinkes mulai melakukan intervensi di sekolah dengan memperkuat peran guru Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dalam pendampingan remaja.

Kabid Pencegahan, Pengendalian Penyakit, dan Penanganan Bencana Dinkes Kota Batu, Susana Indahwati, menyebutkan pada 2024 kasus serupa juga cukup besar, yakni 43 kehamilan remaja dan 111 persalinan remaja.

"Yang paling memprihatinkan, kasus termuda terjadi pada anak usia 14 dan 15 tahun. Jadi tidak bisa dibayangkan, anak usia 14 tahun sudah melahirkan bayi," ujar Susana, dikutip pada Kamis (28/8/2025).

Menurutnya, secara nasional, Kemenkes RI juga mencatat setiap tahun sekitar 15 juta remaja berusia 15-19 tahun melahirkan, 4 juta melakukan aborsi dan hampir 100 juta terinfeksi penyakit Menular Seksual (PMS) yang dapat dicegah.

Fenomena ini, lanjut Susana, sebagian besar disebabkan oleh minimnya pengawasan dan edukasi dari orang tua. Topik kesehatan seksual masih dianggap tabu, sehingga anak mencari informasi dari media sosial maupun lingkungan pergaulan.

"Informasi yang diperoleh tidak bisa mereka sortir, sehingga akhirnya terjerumus dan berujung pada kehamilan di luar pernikahan," jelasnya.

Untuk menekan angka tersebut, Dinkes Kota Batu menyiapkan langkah intervensi di sekolah-sekolah dengan memperkuat peran guru UKS. Menurut Susana, sebagian besar waktu produktif anak dihabiskan di sekolah, sehingga pendampingan dari guru sangat diperlukan.

Dijelaskannya, guru UKS akan dibekali strategi khusus, salah satunya layanan konseling bagi remaja. Dalam pendekatannya, guru diimbau tidak menggunakan cara lama, melainkan bersikap lebih dekat dengan remaja.

"Gen Z hari ini tidak bisa diperlakukan seperti zaman kita dulu. Edukasi harus diberikan bukan sebagai guru, bukan sebagai orang tua, tapi sebagai sahabat," katanya.

Selain guru, Susana menekankan pentingnya peran orang tua yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Dengan keterbukaan informasi di media sosial, anak bisa dengan mudah mengakses berbagai konten yang berisiko jika tidak didampingi.

"Tak hanya guru dan orang tua, masyarakat termasuk tokoh komunitas seni maupun budaya juga perlu dilibatkan dalam edukasi ini," tambahnya.

Kabid Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Penanganan Bencana Dinkes Kota Batu, Susana Indahwati. (dok. Ist)

Susana menegaskan, edukasi kesehatan reproduksi sejak dini tidak hanya untuk mencegah kehamilan remaja, tetapi juga berkaitan dengan penanganan stunting. Intervensi sejak remaja diharapkan melahirkan generasi yang lebih sehat.(Santi/Dya)

SAH! 25 ANAK TELANTAR KOTA MALANG MILIKI WALI HUKUM

Sidang penetapan perwalian anak di Kota Malang, Kamis (28/8/2025). (Santi/Lentera)

MALANG - Pengadilan Agama (PA) Kota Malang menetapkan perwalian 25 anak telantar melalui sidang terpadu, Kamis (28/8/2025). Putusan itu memastikan anak-anak yang sebelumnya ditelantarkan orangtua kandung berada dalam pengasuhan yang sah secara hukum.

Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, menyebut persidangan penetapan perwalian ini penting sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap anak-anak terlantar.

"Keinginan kami adalah anak-anak yang tidak beruntung dalam keluarga, itu tidak lagi punya sumbatan dalam kepengurusan administrasi. Sehingga hari ini PA sudah menyidangkan 25 dan sudah ditetapkan. Dan hari ini sudah ber-kekuatan hukum tetap," ujarnya.

Ali menambahkan, proses pengurusan hingga persidangan ini tidak memerlukan waktu lama karena dilakukan secara terpadu. Dengan sinergi lintas sektor, penetapan perwalian bisa selesai hanya dalam waktu 10 hari kerja.

"Sebenarnya tidak rumit. Kalau sudah ada kesepakatan bersama, menjadi tanggung jawab kita bersama, dan Pemerintah Kota Malang tentu sangat menyambut dan mempermudah semuanya," katanya.

Ali menyebut, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), menjadi leading sektor dalam proses ini, sekaligus memastikan kerjasama berjalan lancar.

Sementara itu, Pekerja Sosial Ahli Pertama Dinsos-P3AP2KB Kota Malang, Rendita Putri, menjelaskan sebelumnya ada 29 berkas anak yang diajukan untuk penetapan perwalian. Setelah diverifikasi, hanya 25 yang lolos dan diputuskan melalui sidang hari ini.

"Dari 29 anak itu terdiri dari 12 pemohon Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), kemudian sisanya dari pemohon individu. Setelah kami verifikasi dan validasi, ada 25 berkas yang akhirnya lolos untuk masuk ke sidang perwalian hari ini," terangnya.

Sementara empat berkas lainnya diproses dengan mekanisme berbeda karena kasusnya memerlukan pencabutan wali secara gaib, sesuai arahan Pengadilan Agama.

Rendita menambahkan, seluruh anak yang ditetapkan perwaliannya, berusia di bawah 17 tahun. Beberapa masih sangat kecil, bahkan ada yang baru berusia 1 tahun.

Menurutnya, kasus yang muncul beragam. Mulai dari anak yang diketahui ada orangtua namun tidak lagi bisa ditelusuri keberadaannya, hingga anak yang benar-benar dibuang dan tidak diketahui asal-usul orangtuanya.

Selain penetapan perwalian, sidang terpadu juga diikuti oleh Dispendukcapil. Bagi anak-anak yang belum memiliki administrasi kependudukan, langsung diarahkan untuk diproses penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Beberapa anak bisa langsung dicetak NIK nya, sementara yang sama sekali tidak diketahui asal-usul orangtuanya harus melalui mekanisme Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian. Rendita menyebut, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pencatatan Sipil dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.

"Kalau penetapan perwalian sudah keluar, berkasnya dibawa ke kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan. Dari situ hasil pemeriksaan dibawa ke Dispendukcapil untuk diproses keadministrasian kependudukan," terang Rendita.

Terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang, Tri Joko, menambahkan aturan perwalian telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2019. Syarat utama bagi wali adalah berstatus warga negara Indonesia, berusia minimal 30 tahun, berkelakuan baik, serta memiliki niat untuk menjadi wali.(Santi/Dya)

Serangan Rudal-Drone Rusia Guncang Kyiv, 10 Tewas

Pasukan Rusia menggencarkan serangan rudal dan drone berskala besar terhadap ibu kota Ukraina, Kyiv. Serangan beruntun tersebut menewaskan 10 orang, melukai 38 lainnya, serta menghancurkan sejumlah rumah dan bangunan di tujuh distrik kota.

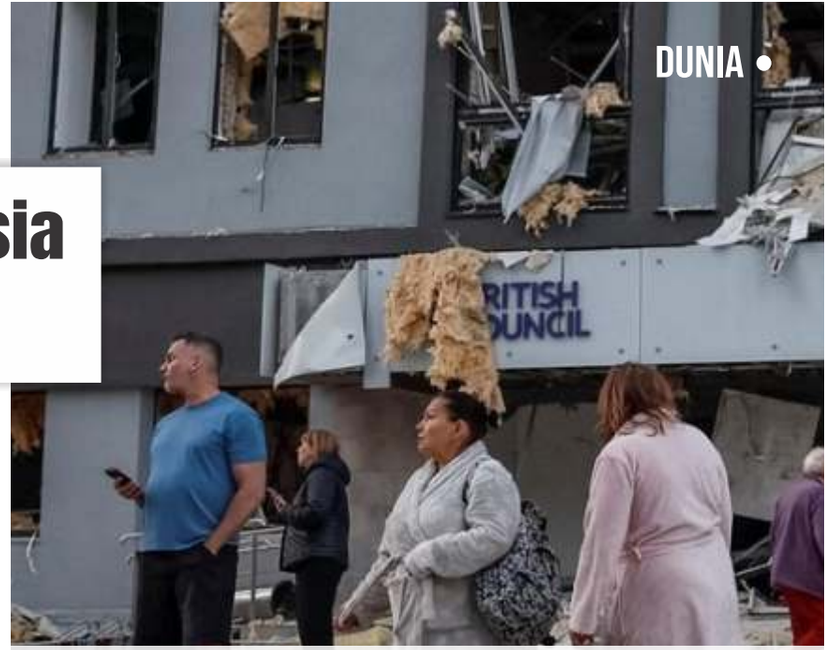

Kerusakan akibat serangan udara Rusia di ibu kota Ukraina, Kyiv (Foto: Reuters)

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menekankan bahwa serangan yang juga menewaskan seorang anak tersebut menjadi bukti bagi dunia tentang cara Rusia menanggapi upaya diplomasi, ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump sedang berusaha menghentikan perang.

"Rusia memilih balistik, bukan meja perundingan," kata Zelenskyy di media sosial X, dikutip dari Reuters dan Al Arabiya, Kamis (28/8/2025). Dia pun menyerukan sanksi baru terhadap Rusia. "Rusia memilih untuk terus membunuh, bukan mengakhiri perang," cetusnya.

Otoritas kota Kyiv melaporkan setidaknya 38 orang terluka saat operasi pencarian dan penyelamatan sedang berlangsung, dengan layanan darurat memadamkan api dan menyisir puing-puing bangunan yang hancur.

Ledakan-ledakan menerangi langit malam di ibu kota selama peringatan udara, yang berlangsung selama lebih dari sembilan jam, dengan kepulan asap menutupi langit saat drone terbang di atas.

Angkatan Udara Ukraina mengatakan telah menembak jatuh 563 dari 598 drone dan 26 dari 31 rudal yang diluncurkan Rusia dalam serangan di seluruh negeri pada Rabu (27/8/2025) malam waktu setempat.

Angkatan Udara mencatat serangan di 13 lokasi dan puing-puing jatuh di 26 lokasi.

"Sayangnya, gaya Rusia khas dalam serangan mereka," tulis Tymur Tkachenko, kepala administrasi militer Kyiv, di Telegram.

"Serangan gabungan, dari berbagai arah. Dan sistematis, menargetkan bangunan tempat tinggal biasa," ujarnya.

Rusia yang menyangkal menargetkan warga sipil, telah meningkatkan serangan udara dalam beberapa bulan terakhir di kota-kota Ukraina yang jauh dari garis depan perang.

Para pejabat Ukraina mencatat banyak bangunan yang mengalami kerusakan, termasuk beberapa blok apartemen bertingkat tinggi. (Reuters, Al Arabiya, ist/nei)

PERKEMBANGAN PERANG RUSIA-UKRAINA

PERTEMPURAN
- Serangan Rusia ke Kyiv: 4 tewas, 24 luka, TK rusak.
- Rusia kuasai Novoheorhiivka & Zaporizke.
- Serangan tewaskan 3, listrik >100 ribu rumah padam.
- 3 tewas di Kherson (2 pekerja, 1 lansia).

DIPLOMASI & PERDAMAIAN
- Zelenskyy: Rusia beri sinyal negatif.
- Kremlin tolak perdamaian, salahkan NATO.

POLITIK & DIPLOMASI
- Olha Stefanishyna ditunjuk Dubes AS.
- Yermak kunjungi Riyadh & New York.

KEAMANAN REGIONAL
- Jerman perkuat milisi & buka pabrik amunisi.
- Rumania kontrak €535 juta pabrik bahan peledak.
- Ekspor pertahanan Jerman €12,8 miliar.
- UE & Polandia kunjungi Moldova.

EKONOMI
- Pertumbuhan Rusia turun ke 1,5%.
- Ekspor bensin Rusia stop hingga 31 Okt.
- Pasokan minyak ke Hungaria terancam.
- AS tarif 50% produk India.
- Ukraina lelang tambang litium "Dobra".

Kebakaran di kilang minyak Kuybyshevsky di Samara, Rusia, setelah serangan pesawat tak berawak pada Kamis (28/8/2025). (Foto: Telegram/Exilenova+)

Kilang Minyak Kuybyshev dan Afipsky Jadi Target Serangan Ukraina

UNIT Sistem Tak Berawak, bersama elemen lain dari Pasukan Pertahanan Ukraina, melancarkan serangan pada Kamis malam (28/8/2025) dengan sasaran kilang minyak Kuybyshev di Samara dan Afipsky di Krasnodar.

Dikutip dai Ukrinform, Informasi ini disampaikan melalui Telegram oleh Komandan Pasukan Sistem Tak Berawak, Robert Brovdi, yang dikenal dengan sandi panggilan "Madyar".

Komandan tersebut menyebutkan bahwa pada malam itu kapasitas penyulingan minyak Rusia berkurang 4,7%, sehingga akumulasi kerugian dalam dua pekan terakhir mencapai 21%.

Resimen ke-14 Pasukan Sistem Tak Berawak, bekerja sama dengan Pasukan Operasi Khusus, menyerang kilang Kuybyshev di wilayah Samara, yang memproduksi 7 juta ton minyak per tahun, setara dengan 2,5% dari total produksi. Kilang Afipsky di wilayah Krasnodar dihantam oleh Resimen ke-14 bersama pasukan khusus Direktorat Utama Intelijen Kementerian Pertahanan Ukraina. Kilang ini memproduksi 6,25 juta ton minyak per tahun, setara dengan 2,2% dari total produksi.

Menurut saluran Telegram Astra, penduduk awalnya melaporkan serangan terhadap kilang Novokuybyshev di wilayah Samara, tetapi kemudian dikonfirmasi bahwa kilang Kuybyshev di Samara menjadi sasaran.

Gubernur wilayah Samara menyatakan bahwa "wilayah tersebut diserang oleh UAV musuh. Pertahanan udara dan layanan darurat sedang beroperasi."

Ia juga melaporkan bahwa pembatasan sementara diberlakukan di bandara Samara untuk kedatangan dan keberangkatan, dan "demi keselamatan warga, layanan internet seluler telah dibatasi."

Kereta Api Kuybyshev melaporkan bahwa UAV menyerang stasiun kereta api Kryazh di wilayah Samara. Akibatnya, 3 kereta dibatalkan dan 10 kereta ditunda.

Pihak berwenang di wilayah Krasnodar mengonfirmasi serangan terhadap kilang Afipsky.

Di desa Afipsky, distrik Seversky, puing-puing menyebabkan kebakaran di salah satu unit kilang. Kebakaran seluas 20 meter persegi sedang dipadamkan oleh 21 personel dan 8 peralatan, demikian pernyataan laporan tersebut.

Dikutip dari BBC , Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah menembak jatuh 102 pesawat tak berawak Ukraina di sejumlah wilayah termasuk wilayah Laut Hitam dan Laut Azov, wilayah Rostov, Samara, Voronezh, dan Volgograd, serta wilayah Krasnodar.

Meskipun militer Rusia melaporkan jatuhnya dua UAV di wilayah Volgograd, gubernurnya menggambarkan serangan itu sebagai serangan besar dan melaporkan kebakaran di depot lokomotif. (Ukrinform, BBC, ist/nei)

HARIAN LENTERA
Inspirasi Perubahan

Wajib Diganti! Barang Ini Bisa Jadi Sumber Penyakit

Kita seringkali tidak menyadari bahwa sejumlah barang di rumah yang dipakai setiap hari bisa menjadi sumber penyakit bila tidak diganti secara rutin. Meski tampak masih layak pakai, benda-benda ini sebenarnya dapat menjadi sarang bakteri, jamur, dan kuman berbahaya. Beberapa contohnya adalah sikat gigi, spons dapur, dan bantal, yang masing-masing memiliki masa pemakaian tertentu yang sebaiknya diperhatikan.

Untuk menjaga kesehatan tubuh, kulit, serta sistem pernapasan, sangat penting untuk mengetahui kapan waktu yang tepat untuk mengganti barang-barang rumah tangga tersebut. Artikel ini akan membahas 11 barang sehari-hari yang harus diganti rutin menurut para ahli kesehatan, lengkap dengan alasan medis, rekomendasi waktu penggantian, serta tips untuk pengelolaan limbah yang baik.

Sikat Gigi

Sikat gigi perlu diganti setiap tiga hingga empat bulan atau segera setelah bulunya aus, sesuai rekomendasi American Dental Association (ADA). Bulu sikat yang rusak tidak efektif membersihkan plak, dapat melukai gusi, dan berpotensi menjadi sarang bakteri, terutama bila disimpan di tempat lembap.Setiap penggunaan, sikat gigi terpapar air liur, sisa makanan, dan mikroorganisme yang dapat berkembang biak. Karena itu, simpanlah sikat gigi dalam posisi tegak dan terbuka agar cepat kering, atau gunakan penutup kepala sikat berventilasi. Sikat yang sudah tidak layak pakai sebaiknya dialihfungsikan, misalnya untuk membersihkan keran atau sepatu, bukan untuk tubuh.

Kasur

Kualitas tidur sangat dipengaruhi oleh kondisi kasur. Menurut para ahli, kasur sebaiknya diganti setiap 7–10 tahun karena seiring waktu dapat menjadi sarang debu, tungau, dan jamur yang memicu alergi, asma, atau gangguan kulit. Tanda kasur perlu diganti antara lain terasa kendur, berisik, berbau, atau menimbulkan pegal dan tidur tidak nyenyak.

Untuk menjaga kebersihan dan daya tahan kasur, gunakan pelindung anti alergi, cuci seprai tiap minggu, vakum permukaan kasur secara rutin, serta hindari makan atau membawa hewan peliharaan ke tempat tidur.

Spons Dapur

Spons dapur sering kali menjadi sarang bakteri berbahaya seperti E. coli dan Salmonella, bahkan lebih kotor dibanding dudukan toilet.

Penelitian menunjukkan satu spons dapat mengandung hingga 45 miliar bakteri per sentimeter kubik. Karena itu, spons sebaiknya diganti setiap dua minggu atau lebih cepat jika berbau.Meski bisa disterilkan sementara dengan microwave atau mesin pencuci piring, cara tersebut tidak membersihkan sepenuhnya.

Loofah dan Spons Mandi

Loofah, baik alami maupun plastik, mudah menyerap air dan sel kulit mati sehingga menjadi tempat tumbuh bakteri, jamur, hingga lumut. Penggunaannya yang kotor dapat memicu infeksi kulit, iritasi, atau jerawat. Para ahli menyarankan loofah diganti setiap 2–4 minggu, disimpan di tempat kering, dan tidak digantung di dalam shower. Alternatif yang lebih higienis adalah menggunakan waslap yang bisa dicuci setelah setiap pemakaian.

Wadah Plastik

Wadah plastik yang retak, tergores, atau berubah warna sebaiknya segera diganti karena berpotensi melepaskan bahan kimia berbahaya seperti BPA dan PFAS yang dapat mengganggu kesehatan. Tanda lainnya adalah permukaan keruh, berubah warna akibat makanan, atau bentuk rusak karena panas microwave.

Sebagai alternatif, gunakan wadah kaca atau stainless steel yang lebih aman dan tahan lama. Jika tetap menggunakan plastik, pilihlah yang berlabel food grade dan hindari memanaskannya di microwave.

Panci Anti-Lengket

Panci anti-lengket yang lapisannya terkelupas sebaiknya segera diganti karena berpotensi melepaskan partikel berbahaya seperti PFAS (forever chemicals) ke dalam makanan. Paparan zat ini bisa memicu gangguan hormonal, kerusakan hati, hingga masalah perkembangan janin.

Gunakan alternatif lebih aman seperti panci besi cor atau stainless steel. Untuk memperpanjang usia panci anti-lengket, hindari penggunaan spons kasar dan spatula logam.

Alas Pemotong

Papan pemotong yang penuh goresan dapat menjadi tempat berkembangnya bakteri, jamur, dan virus, terutama jika dipakai bergantian untuk daging dan sayuran. Papan plastik sebaiknya diganti saat sudah banyak goresan, sedangkan papan kayu perlu diganti jika muncul noda hitam, bau, atau retakan. Untuk mencegah kontaminasi, gunakan papan terpisah untuk daging dan sayuran, bersihkan dengan air panas dan disinfektan, serta pastikan papan kayu dikeringkan dengan baik setelah digunakan.

Bantal

Bantal tidak hanya berfungsi sebagai penopang kepala, tetapi juga menyerap keringat, minyak kulit, air liur, dan sel-sel kulit mati yang dapat menjadi makanan bagi tungau debu. Hal ini berpotensi memicu alergi, asma, dan iritasi kulit. Para ahli menyarankan untuk mengganti bantal setiap 1 hingga 3 tahun, karena selain bisa menjadi sarang alergen, bantal lama juga kehilangan bentuk dan daya topang sehingga berdampak pada postur leher serta kualitas tidur.

Tanda bantal perlu diganti antara lain leher terasa kaku saat bangun tidur, bantal menggumpal, atau berbau apek. Untuk memperpanjang umur bantal, gunakan sarung pelindung antialergi, cuci bantal secara rutin, dan manfaatkan kembali .(nei,ist/dya)

ILMUWAN LUNCURKAN PETA GENOM MANUSIA TERBARU

Ilustrasi tes DNA.
Dok. Shutterstock

Ilmuwan berhasil merilis peta genom manusia paling lengkap hingga saat ini, yang diyakini dapat merevolusi praktik kedokteran. Riset yang dipublikasikan di jurnal Nature tersebut memetakan hampir seluruh DNA kaya ulangan yang sebelumnya sulit dijangkau, termasuk bagian yang berperan dalam risiko penyakit dan respons terhadap obat.

Peta ini tidak hanya mencakup satu urutan, melainkan 65 genom lengkap dari berbagai latar belakang dengan tingkat ketelitian tinggi. Cakupan luas tersebut membuka jalan bagi penerapan pengobatan presisi, yaitu perawatan yang disesuaikan dengan susunan genetik masing-masing individu.

Bagian paling sulit dibaca adalah wilayah dengan variasi struktural seperti penyisipan besar, penghapusan, inversi, duplikasi, dan translokasi yang kerap mengubah cara kerja gen.

"Jika variasi ini diabaikan, model risiko tidak akurat dan diagnosis penyakit langka terhambat. Keberhasilan membacanya bisa menjadi pembeda antara petunjuk genetik samar dengan jawaban klinis yang pasti," kata Christine Beck dari The Jackson Laboratory dan UConn Health, yang memimpin studi ini bersama tim Human Genome Structural Variation Consortium (HGSVC), dikutip dari laporan Earth, 21 Agustus 2025.

Dari 130 haplotipe, peneliti menutup 92 persen celah penyusunan yang tersisa dari referensi sebelumnya dan membawa 39 persen kromosom ke status lengkap dari telomere ke telomere. Mereka juga memecahkan 1.852 variasi struktural kompleks yang sebelumnya tidak dapat diurai, serta memvalidasi 1.246 sentromer manusia.

Studi ini juga mencatat 12.919 penyisipan dari elemen transposabel, urutan DNA bergerak yang dapat mengatur ulang aktivitas gen. Temuan ini menyumbang hampir 10 persen dari seluruh variasi struktural yang terdeteksi. Selain itu, peneliti menyajikan urutan lengkap Major Histocompatibility Complex (MHC) terkait sistem imun, serta wilayah lain yang berpengaruh terhadap pencernaan dan perkembangan.

Untuk pertama kalinya, referensi genetik disusun lebih inklusif setelah selama bertahun-tahun banyak populasi dunia tidak terwakili. Teknologi terkini memungkinkan ilmuwan menangkap lebih dari 95 persen variasi struktural pada setiap genom yang diteliti.

MHC sendiri membawa variasi imun padat yang terkait dengan lebih dari 100 penyakit manusia. Penyusunan lengkap wilayah ini membantu klinisi menilai risiko secara lebih presisi pada berbagai populasi. Studi ini juga memetakan gen SMN1 dan SMN2, target obat untuk atrofi otot spinal. Peta lebih baik diyakini akan mempercepat diagnosis serta akses pengobatan.

Selain itu, peneliti menyelesaikan bagian kromosom Y yang selama ini sulit, melanjutkan upaya 2023 yang pertama menghasilkan urutan Y tanpa celah. Penyelesaian ini memberi dasar lebih jelas untuk penelitian kesuburan maupun forensik.

Terobosan ini melanjutkan capaian 2022 saat Telomere to Telomere Consortium mempublikasikan urutan genom manusia tunggal pertama, dan 2023 ketika Human Pangenome Reference memperluas representasi dengan 47 genom dari berbagai leluhur.

Peneliti menekankan, ketika genom referensi melewatkan variasi umum, jalur klinis kesulitan bekerja. Perluasan katalog variasi struktural diyakini dapat memperkuat diagnosis penyakit langka, prediksi risiko, serta interpretasi klinis. (nei,ist/dya)

HARIAN LENTERA Inspirasi Perubahan TODAY

HARIAN **"LENTERA TODAY"**
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO **I GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) **I MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH **I LAMONGAN:** L HANDI **I BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA **I KEDIRI:** GATOT SUNARKO **I JOMBANG :** SUTONO **I PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO **I BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO **I MADIUN: WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) I MALANG RAYA: SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. I MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN **I TRENGGALEK:** TINA W **I NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO **I DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN **I LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN **I PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

MEDIA TERVERIFIKASI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH **I MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN **I SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH **DESAIN GRAFIS** PAULUS IVAN **I ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 **I TELP** 03187854491 **I PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA **I ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA **I TELP IKLAN** 031-87854491 **I NIB** 91205006801134 **I HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal kewartawanan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal kewartawanan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

HARIAN LENTERA
Inspirasi Perubahan

Jelajahi Dubrovnik, Kota Indah di Kroasia Selatan

Tembok Dubrovnik

Gua Biru Ikonik

Kepulauan Malphite

Air Terjun Kravice

Sering disebut sebagai "Mutiara Laut Adriatik", Kota Dubrovnik memang pantas menyandang julukan tersebut. Kota indah di pantai selatan Kroasia ini merupakan salah satu tujuan wisata paling populer di Laut Mediterania.

Kota ini terkenal dengan sejarah dan budaya yang kaya, arsitektur menakjubkan, serta pemandangan alam yang indah. Kawasan Kota Tua bahkan telah terdaftar sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO dan dipenuhi landmark bersejarah seperti Tembok Dubrovnik serta Istana Rektor.

Selain itu, Dubrovnik juga dikenal sebagai salah satu lokasi syuting utama serial televisi terkenal Game of Thrones. Dengan pantai menawan, jalanan berbatu yang khas, dan suasana yang semarak, Dubrovnik menyajikan pengalaman tak terlupakan bagi setiap wisatawan.

Tembok Dubrovnik

Aktivitas wisata nomor satu di Dubrovnik adalah berjalan-jalan di sepanjang tembok yang mengelilingi Kota Tua, dan mudah dipahami alasannya. Tembok Dubrovnik merupakan rangkaian tembok pertahanan dari batu kapur putih yang sangat tinggi, dibangun, diperluas, dan diperkuat terus-menerus sejak abad ke-12 hingga abad ke-17. Tembok ini kerap dianggap sebagai salah satu benteng terkuat pada Abad Pertengahan karena tidak pernah jatuh ke tangan musuh sepanjang sejarahnya.

Beberapa bagian dinding mencapai ketinggian hingga 82 kaki dan ketebalan sekitar 20 kaki. Untuk masuk, dikenakan biaya sebesar 200 HRK melalui salah satu dari tiga titik masuk di sekitar Kota Tua. Rata-rata, wisatawan memerlukan waktu sekitar satu hingga dua jam untuk menyelesaikan rute penuh di sepanjang tembok, baik dengan berjalan cepat maupun dengan santai.

Disarankan untuk berhenti sejenak menikmati panorama Laut Adriatik yang berkilauan di satu sisi dan pemandangan Kota Tua di sisi lainnya. Hampir setiap bagian tembok menawarkan sudut pandang unik, menjadikannya lokasi ideal untuk berfoto.

Pada musim panas, Tembok Dubrovnik juga menjadi panggung pertunjukan Shakespeare dalam rangka Festival Musim Panas kota. Waktu terbaik untuk berkunjung adalah pada sore hari, ketika sebagian besar wisatawan kapal pesiar telah meninggalkan kota dan sebelum keramaian mulai memadati lokasi.

Gua Biru Ikonik

Gua Biru merupakan salah satu keajaiban alam paling menawan di Dubrovnik. Tempat ini terkenal karena airnya yang berkilau kebiruan, tercipta dari pantulan sinar matahari yang masuk melalui celah-celah bawah air di dalam gua. Keindahan tersebut menjadikan Gua Biru sebagai destinasi yang layak dikunjungi.

Perjalanan dimulai dengan menaiki perahu menuju Pantai Šunj di Pulau Lopud. Pantai ini terkenal dengan perairan dangkal nan jernih serta pasir lembutnya, menjadikannya lokasi ideal untuk berenang maupun bersantai di bawah sinar matahari.

Setelah menikmati suasana pantai, perjalanan dilanjutkan menuju Gua Biru yang ikonis. Dengan peralatan snorkeling, wisatawan dapat menyelam ke dalam air biru kehijauan yang berkilauan untuk merasakan langsung pesona keajaiban alam tersebut.

Kepulauan Elaphite

Pelayaran sehari penuh ke Kepulauan Elaphite merupakan pilihan ideal untuk menikmati suasana tenang Laut Adriatik sekaligus sejenak beristirahat dari keramaian Dubrovnik. Perjalanan ini mencakup kunjungan ke tiga pulau: Lopud dengan Pantai Šunj yang indah, Šipan dengan pesona desa dan kebun zaitun kunonya, serta Koločep yang menawarkan perairan jernih dan pantai tenang.

Sepanjang pelayaran, wisatawan disambut dengan layanan ramah, hidangan makan siang lezat dengan pilihan ikan, ayam, atau vegetarian, serta minuman tanpa batas termasuk anggur.

Air Terjun Kravice

Tur sehari ke Mostar dan Air Terjun Kravice adalah cara sempurna untuk menikmati perpaduan sejarah dan alam di sekitar Dubrovnik. Perjalanan dimulai dengan rute indah melintasi Bosnia dan Herzegovina sebelum tiba di Kota Mostar, yang terkenal dengan Stari Most, jembatan ikonis bersejarah yang masuk dalam daftar Warisan Dunia UNESCO. Menyusuri jembatan bersejarah dan jalanan berbatu yang dipenuhi toko-toko lokal memberikan pengalaman budaya yang unik.

Setelah itu, perjalanan berlanjut menuju Air Terjun Kravice, keajaiban alam yang kerap dijuluki "Niagara mini." Deretan air terjun yang jatuh ke kolam berwarna hijau zamrud menciptakan suasana menakjubkan. Di sini, pengunjung dapat berenang, bersantai, atau sekadar berfoto dengan latar pemandangan alam yang memukau.

Dengan rombongan kecil yang berisi tidak lebih dari delapan orang serta pemandu berpengetahuan luas, tur ini terasa pribadi, nyaman, dan informatif. Bagi wisatawan yang ingin menjelajahi lebih dari sekadar Dubrovnik, perjalanan sehari ini merupakan pilihan yang tidak boleh dilewatkan.

Pulau Lokrum

Pulau Lokrum adalah surga Mediterania yang terletak sekitar 2.000 kaki dari pantai Dubrovnik. Tempat ini dapat dicapai dengan naik feri selama 10 menit dari pelabuhan Kota Tua. Pulau ini ditutupi pepohonan hijau subur dan dilintasi oleh jalan setapak yang memungkinkan pengunjung menikmati waktu dikelilingi alam.

Terdapat beberapa pantai berkerikil menawan yang cocok untuk bersantai, sementara perairannya ideal untuk berenang.

Selain itu, tersedia pula danau air asin kecil di pulau tersebut yang dapat digunakan untuk berenang dan menyelam. Meski merupakan destinasi wisata populer, Pulau Lokrum tetap menghadirkan tempat istirahat yang menyenangkan dari keramaian kota.

Di Pulau Lokrum juga terdapat Biara Benediktin yang dibangun pada abad ke-11. Kini, bangunan tersebut berfungsi sebagai museum, restoran, sekaligus menampilkan replika Tahta Besi dari Game of Thrones. Tepat di sebelahnya, terdapat taman botani indah dengan lebih dari 200 spesies tanaman berbeda.(nei,ist/dya)

Wamen Rangkap ...dari hal 1

Putusan MK tersebut termuat dalam Putusan Perkara Nomor: 128/PUU-XXIII/2025 yang diajukan oleh Advokat Viktor Santoso Tandiasa terkait pengujian materi Pasal 23 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

"Mengabulkan permohonan pemohon I untuk sebagian," ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (28/8/2025).

Hakim juga menyatakan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai Menteri dan Wakil Menteri.

Kemudian, dengan tegas keputusan ini menyatakan Menteri dan Wakil Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau Pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

"Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Menyatakan permohonan Pemohon II tidak dapat diterima; Menolak permohonan untuk selain dan selebihnya," lanjut Suhartoyo.

MK pun memberikan tenggang waktu (grace period) bagi pemerintah untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan larangan jabatan wakil menteri sebagai komisaris.

Sementara, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyebutkan dalil pemohon yang meminta agar para wakil menteri fokus mengurus kementerian dinilai sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Atas hal tersebut, MK menilai perlu agar para wakil menteri dilarang merangkap jabatan agar fokus mengurus kementerian. "Dalam batas penalaran yang wajar, peraturan perundang-undangan dimaksud salah satunya adalah UU 39/2008. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah menegaskan dalam amar Putusan a quo mengenai larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri termasuk sebagai komisaris, sebagaimana halnya menteri agar fokus pada penanganan urusan kementerian," kata Enny dalam sidang, Kamis (28/8/2025).

Selain itu, Mahkamah berpendapat, wakil menteri juga memerlukan konsentrasi waktu untuk menjalankan jabatannya sebagai komisaris. "Terlebih, pengaturan larangan rangkap jabatan karena berkaitan pula dengan prinsip penyelenggaraan negara yang bersih, bebas dari konflik kepentingan, serta pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik," kata Enny.

Advokat Viktor Santoso Tandiasa sebagai pemohon memohon kepada MK agar dalam memeriksa permohonan ini, MK memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong perbaikan tata kelola pada perusahaan-perusahaan milik negara, dengan memuat larangan rangkap jabatan tersebut secara tegas dalam amar putusan sebagaimana dimohonkan dalam petitum Pemohon.

Dengan demikian, ketentuan larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri akan bersifat mengikat dan menghindarkan timbulnya ketidakpastian hukum di kemudian hari. Upaya ini merupakan wujud constitutional morality, baik bagi MK dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai the guardian of the constitution.

Terhadap putusan tersebut, dua orang hakim menyatakan berbeda pendapat (dissenting opinion), yakni Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan Arsul Sani.

Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh memandang bahwa permohonan a quo seharusnya ditolak, bukan dikabulkan sebagian. Kemudian dia juga memandang bahwa presiden memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan wakil menteri, kedudukan menteri lebih dominan sebagai pemimpin kementerian, sedangkan wakil menteri hanya pembantu.

Selain itu, Daniel juga memandang bahwa Putusan MK No. 80/PUU-XVII/2019 sudah memberi rambu-rambu bahwa larangan rangkap jabatan menteri berlaku juga bagi wakil menteri. Sehingga, larangan tersebut cukup dituangkan dalam pertimbangan hukum dan tidak perlu dalam amar putusan.

Sedangkan, Hakim Konstitusi Arsul Sani tidak setuju dengan amar putusan karena Mahkamah telah bertindak sebagai positive legislature, yakni menambahkan norma baru dengan memasukkan "wakil menteri" ke dalam Pasal 23 UU 39/2008. Seharusnya MK menerapkan due process yang deliberatif dan partisipatif, dengan mendengar keterangan pembentuk undang-undang serta pihak yang terdampak langsung, misalnya wakil menteri yang rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN.

Pertimbangan dalam Putusan MK No. 80/PUU-XVII/2019 terkait larangan rangkap jabatan wakil menteri memang relevan, namun bila hendak dipertahankan sebaiknya dituangkan dalam bentuk judicial order kepada pembentuk undang-undang untuk merevisi UU, bukan langsung menambah norma dalam amar.

Keputusan tersebut disampaikan sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota. Kemudian ada Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, DanielYusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing- masing sebagai Anggota. Dan dibantu oleh Fenny Tri Purnamasari sebagai Panitera Pengganti.

Fenomena Rangkap Jabatan Wakil Menteri yang menduduki jabatan Komisaris di Perusahaan-Perusahaan Milik Negara terus berlangsung. Bahkah hingga hari ini setidaknya terdapat 30 Wakil Menteri yang menduduki jabatan Komisaris di Perusahaan-Perusahaan MilikNegara, sebagai berikut:

1. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono - Komisaris Utama PTPupuk Indonesia (Persero).
2. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero).
3. Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha - Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMFI).
4. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo - Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
5. Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan - Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
6. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
7. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah - Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
8. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo - Komisaris UtamaPT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
9. Wakil Menteri UMKM Helvy Yuni Moraza – Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
10. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti - Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero).
11. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung - Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
12. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono – Komisaris PT Pertamina Bina Medika.
13. Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto - Komisaris Utama PT Dahana.
14. Wakil Menteri P2MI/Wakil Kepala BP2MI Christina Aryani - Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
15. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono - Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)
16. Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria - Komisaris PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel).
17. Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri - Komisaris Utama PT Sarinah
18. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinator Penanaman Modal Todotua Pasaribu - Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
19. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Isyana Bagoes Oka - Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel).
20. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro - Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
21. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan - Komisaris PT Citilink Indonesia.
22. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat - Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia
23. Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno – Komisaris PT Pertamina International Shipping (PIS).
24. Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono - Komisaris PT Pertamina Patra Niaga
25. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie - Komisaris PT Pertamina Hulu Energi (PHE)
26. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf - Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero)
27. Wakil Menteri Perhubungan Komjen Pol (Purn) Suntana - Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
28. Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto - Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
29. Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruf – Komisaris PLN
30. Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria - Chief Operation Officer (COO) atau Pelaksana di Bidang Operasional BPI Danantara.

Terkait dengan putusan MK tersebut, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menyampaikan pemerintah akan menindaklanjutinya. Ia mengatakan akan berkomunikasi dengan Presiden RI Prabowo Subianto serta berkoordinasi dengan para pihak terkait.(rls,ant,ist/lut)

HARIAN LENTERA
Inspirasi Perubah

WABAH CAMPAK DI SUMENEP, PEMEKASAN, DAN BANGKALAN

MENKES : LEBIH BERBAHAYA DARI COVID-19

Terkait dengan wabah penyakit campak yang menyerang tiga kabupaten yaitu Sumenep, Bangkalan, dan Pamekasan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebut penyakit campak lebih berbahaya dari Covid-19 karena tingkat penularan penyakit tersebut lebih cepat. Di tiga kabupaten tersebut, campak telah mengakibatkan 19 anak meninggal dunia.

"Jika Covid-19 memiliki tingkat penularan satu orang ke dua hingga tiga orang, campak ini mampu menular dari satu orang ke 18 orang lainnya," kata Menkes Budi Gunadi Sadikin di Sumenep, Jawa Timur, Kamis (28/8/2025).

Di satu sisi, ia mengatakan untuk penanganan penyakit campak ini sama seperti Covid-19 yakni sudah ada vaksinnya dan sangat efektif. "Kalau divaksinasi, anak-anak tidak akan terkena campak yang bisa menyebabkan kematian," ujar Menkes Budi.

Untuk itu, Menkes menegaskan percepatan imunisasi massal bagi sekitar 80 ribu anak di Sumenep. Ia menargetkan seluruh vaksinasi selesai dalam dua minggu. "Kita sudah siapkan 11 ribu vial vaksin, cukup untuk 80 ribu anak. Logistik sudah kami kirim ke Madura," kata Menkes.

Menkes juga mengapresiasi langkah cepat Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, yang sigap mengerahkan aparat hingga tingkat desa untuk mendukung program imunisasi.

Selain itu Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga memperketat pengawasan melalui surveilans ketat di empat kabupaten di Madura, termasuk rencana pendirian laboratorium khusus di pulau tersebut.

"Kami ingin satu laboratorium ada di Madura agar pemeriksaan sampel tidak perlu dikirim jauh ke Surabaya. Begitu ada indikasi campak, bisa segera ditangani dan dilakukan imunisasi massal di wilayah terdampak," ucap Menkes Budi.

Ia juga mengimbau seluruh masyarakat, tidak hanya di Madura tetapi juga daerah lain, seiring dengan tingginya kasus campak seperti Sumatera Utara, agar segera membawa balita dan anak-anak mereka mendapatkan imunisasi. "Campak ini mematikan, jangan sampai terlambat," ujar Menkes Budi Gunadi Sadikin.

Menkes juga sempat berdiskusi dengan para warga Sumenep yang datang mengantarkan anak-anaknya ikut imunisasi di TK Qurrota Ayyun. "Sudah dapat izin ya dari keluarga untuk imunisasi?" tanya Menkes.

"Sudah Pak, sudah dapat izin dari suami," kata Muniroh, salah satu warga.

Menkes Budi Gunawan Sadikin berdiskusi dengan orang tua siswa saat meninjau pelaksanaan imunisasi campak di Sumenep, Jawa Timur, Kamis (28/8/2025). (Antara)

Menkes pun mengapresiasi upaya tinggi dari warga Sumenep yang ikut imunisasi dan berbondong-bondong datang sejak pagi. "Kesehatan itu penting, dan imunisasi menjadi benteng pertahanan bagi kesehatan anak," jelasnya.

Di tempat yang sama Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, mengatakan pihaknya meminta dukungan semua instansi pemerintah, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat, untuk bergotong royong menyukseskan imunisasi ini, guna menciptakan masyarakat Kabupaten Sumenep yang sehat dan sejahtera.

“Imunisasi ini diberikan secara gratis di seluruh fasilitas kesehatan, termasuk puskesmas, posyandu, serta sekolah-sekolah,” kata Bupati Achmad Fauzi.

Sementara itu, Plt Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pamekasan, Avira Sulistyowati, mengatakan pasien yang meninggal dunia berusia empat tahun. “Kami menyebut sebagai terduga campak, karena hasil uji laboratorium belum keluar," katanya mengutip Antara, Rabu (27/8/2025).

Ia menjelaskan, pasien balita diduga terpapar campak berdasarkan deteksi awal petugas medis dari gejala yang dialami. Menurut dia, balita itu mengalami demam tinggi, batuk, pilek, dan mata merah mirip flu.

Kemudian, muncul bercak koplik atau bintik putih kecil di dalam mulut dan sebelum ruam merah khas campak menyebar ke seluruh tubuh 3-5 hari setelah gejala awal muncul.

"Dan bintik-bintik kecil berwarna putih atau keabu-abuan dengan dasar merah, yang muncul di dalam pipi atau mulut," katanya.

Berdasarkan gejala-gejala ini, maka tim media yang menangani kasus tersebut menduga bahwa anak tersebut terpapar campak. "Karena itu, untuk memastikan apakah positif campak atau bukan, maka Dinkes melakukan uji laboratorium" kata Avira.

Saat ini, warga Pamekasan yang terdata positif campak sebanyak sebanyak 123 anak dari total terduga sebanyak 261 anak.

Avira menjelaskan, tingginya kasus campak di Pamekasan itu akibat rendahnya imunisasi. Dinkes Pamekasan, sambung dia, sudah melakukan imunisasi sejak 20 Agustus 2025 untuk mencegah penyebaran penyakit itu dengan total jumlah sasaran sebanyak 5.016 anak.

Jumlah anak yang positif kasus campak di Pamekasan kali ini lebih banyak, dibanding tahun sebelumnya. Pada 2024, anak yang positif menderita campak sebanyak 25 anak.

Sebelumnya, Dinkes Kabupaten Bangkalan telah menetapkan wilayah itu darurat penyakit campak, menyusul terjadinya peningkatan kasus akhir-akhir ini.

"Ada sebanyak 548 anak di Kabupaten Bangkalan ini yang diduga terpapar campak, bahkan ada yang telah meninggal dunia," kata Kepala Dinkes Bangkalan Nur Hotibah dirilis Antara, Selasa (26/8/2025).

Ia menjelaskan, dari jumlah itu, 275 orang sempat menjalani perawatan di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu (Syamrabu) Bangkalan, satu di antaranya meninggal dunia. Sisanya, di perbagai puskesmas di Kabupaten Bangkalan. Dia mengatakan kasus campak di Bangkalan didominasi oleh anak-anak berusia 2-3 tahun.

Kemudian di Kabupaten Sumenep, kejadian luar biasa (KLB) kasus campak terdata sebanyak 2.035 kasus dengan jumlah penderita meninggal dunia mencapai 17 orang.

"Agar langkah yang diambil bisa berjalan efektif, sehingga dalam penanganan kasus tersebut bisa tepat sasaran dilakukan kerja sama lintas sektor," kata Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes-P2KB) Kabupaten Sumenep, Ellya Fardasah mengutip Antara, Sabtu (23/8/2025). (abh,ant/lut)

Jika Covid-19 memiliki tingkat penularan satu orang ke dua hingga tiga orang, campak ini mampu menular dari satu orang ke 18 orang lainnya. Kalau divaksinasi, anak-anak tidak akan terkena campak yang bisa menyebabkan kematian. Kita sudah siapkan 11 ribu vial vaksin, cukup untuk 80 ribu anak. Logistik sudah kami kirim ke Madura,"

BUDI GUNAWAN SADIKIN

Menteri Kesehatan RI